

Inovasi Pemerintah Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan Melalui Program Pejuang Sigap Di Kabupaten Berau

¹⁾Dwi Widodo

²⁾M.Aldi Al-Banjari

³⁾Muhammad Kamil

^{1.)2.)3.)}Universitas Muhammadiyah Malang

Email: ¹⁾dwy.rapzz@gmail.com; ²⁾Muhamadaldialbanjari@gmail.com

³⁾kamil@umm.ac.id

ABSTRACT

One of the main duties of the government is to provide service. Public service is the fulfillment of people's wants and needs by the public (society) and of course with the aim of increasing the welfare of the community. Every citizen has the right to get good public service. Public service has been regulate in the constitution No. 25 Year 2009 on Public service which regulates the principles of good service which is effectiveness of government functions itself. Thus, as public servant, bureaucrats are obliget to provide the best possible service to the community through policies and programs that are made. Berau Regency provides innovation through the Spry Fightrs (PSS). Program with the aim of realizing good public service. That launch of the spry warrior has just been launched in the pandemic era as a collaborative and innovative development companion program

Keywords : Local Government, Public Service, Fighters With A Prosperous Spirit PSS

Abstrak

Salah satu tugas pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan. Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh publik (masyarakat) dan tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap warga Negara berhak memperoleh pelayanan publik dengan baik. Pelayanan Publik Sudah Di Atur Dalam UUD No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang mengatur tentang prinsip-prinsip pelayanan yang baik yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Dengan demikian sebagai pelayan masyarakat, birokrat wajib memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat melalui kebijakan maupun program yang dibuat. Kabupaten berau memberikan inovasi melalui program pejuang sigap dengan tujuan mewujudkan pelayanan publik yang baik. Peluncuran pejuang sigap baru saja diluncurkan di era pandemi sebagai program pendamping pembangunan kawasan kampung yang kolaboratif dan inovatif.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Pelayanan Publik, Pejuang Sigap Sejahtera

PENDAHULUAN

Kabupaten berau merupakan salah satu daerah yang berada di bagian utara Provinsi Kalimantan Timur dan berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Utara, sampai dengan tahun 2015, wilayah administrasi kabupaten berau dibagi menjadi 13 kecamatan dengan jumlah desa atau

kelurahan sebanyak 100 desa dan kelurahan. Kabupaten berau memiliki luas wilayah 34.127,35 km² yang terdiri dari daratan 23.558,50 Km² dan lautan 10.568,85 Km² sepanjang 4 mil dari garis pantai pulau terluar. Dan sebagian besar kawasan kabupaten berau dikelilingi hutan hijau dan menyimpan sumber daya alam yang dapat bernilai ekonomis.

Kabupaten berau memfokuskan peningkatan pertumbuhan ekonomi dibidang argobisnis dan pariwisata dan pembangunan pada bidang lainnya dilaksanakan secara menyeluruh terpadu sesuai dengan potensi dan permasalahan yang ada dikabupaten berau dengan begini pembangunan perdesaan yang difokuskan pemerintah tergantung pada potensi pariwisata yang ada, yang dasarnya masih banyak desa yang tidak memiliki potensi wisata. Pembangunan desa harus dikerjakan secara merata dimana jika pembangunan desa merata bisa mengangkat akses hidup sejahtera bagi masyarakat yang ada dikabupaten berau. Namun pada kenyataannya masih banyak permasalahan yang diperoleh salah satunya adalah kesenjangan yang ada di kawasan perdesaan.

Kesenjangan kawasan perdesaan dan perkotaan di Indonesia merupakan permasalahan yang harus ditangani secara serius untuk mencegah terjadinya urbanisasi. Tingkat urbanisasi di Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya. Data menunjukkan bahwa 53% masyarakat Indonesia tinggal di daerah perkotaan, dan pada tahun 2050 jumlah ini diproyeksikan meningkat menjadi 71%. (Andari and Ella 2019) Faktor utama meningkatnya terletak pada kemiskinan di kawasan perdesaan hal tersebut antara lain dapat dilihat dari data kesenjangan antara perdesaan dan perkotaan seperti: perbandingan jumlah dan persentase penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Kearifan Kemiskinan. Berdasarkan Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi pada bulan September 2017 dapat diketahui bahwa: (1) jumlah penduduk miskin perkotaan sebanyak 10,27 juta (7,26%) sedangkan perdesaan sebanyak 16,31 juta (13,47%), (2) Indeks Kedalaman Kemiskinan perkotaan sebesar 1,24 sedangkan Indeks Kedalaman Kemiskinan perdesaan sebesar 2.43, dan (3) Indeks Kearifan Kemiskinan perkotaan sebesar 0,30 sedangkan Indeks Kearifan Kemiskinan perdesaan sebesar 0,65. Sehingga program pengembangan kawasan perdesaan merupakan prioritas utama yang harus dilakukan yang menurut penelitian menunjukkan bahwa pembangunan kawasan perdesaan belum terlaksana karena faktor internal yang berasal dari desa yaitu kurangnya inisiatif dan pengetahuan dari

masyarakat desa dan faktor eksternal yang berasal dari pemerintah dalam mensosialisasikan dan melakukan pendampingan kepada masyarakat desa. Dengan adanya permasalahan tersebut diperlukan adanya model pembangunan kawasan perdesaan yang mampu menumbuhkan inisiatif dan mudah untuk diaplikasikan, salah satunya adalah melalui konsep smart rural dan smart village mulai banyak dikembangkan di negara lain untuk mengatasi masalah perdesaan. Pada beberapa tahun belakangan ini, konsep smart rural sedang dikembangkan di Eropa melalui sebuah proyek yang dinamakan Toward a Smart Rural Europe (TASTE). Tujuan dari proyek ini adalah untuk menghasilkan pengetahuan baru dan kebijakan yang relevan dengan kondisi dan faktor-faktor pada pembangunan perdesaan, yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan perdesaan di tingkat lokal/regional, nasional.(Andari and Ella 2019)

Sejalan dengan hal ini kita menyadari bahwa dibutuhkan upaya yang serius untuk mengangkat kualitas keputusan dan tindakan Pemerintah Daerah agar lebih efektif dan efisien melalui terobosan- terobosan inovatif. Menurut Lynn yang menjelaskan bahwa inovasi (dalam organisasi pemerintah) merupakan transformasi dari fungsi utama organisasi dan perubahan yang permanen dan mendasar dalam struktur organisasi (Lynn, 1997) dalam (Wicaksono 2019) Selain itu, penulis lainnya yaitu Albury menjelaskan bahwa inovasi sektor publik merupakan kreasi dan implementasi baru pada aspek proses, produk, pelayanan dan metode penyampaian yang memiliki implikasi dampak yang signifikan pada efektivitas, efisiensi dan kualitas (Trapsilowati et al. 2015). Dahama dan Bhatagar dalam Merdikanto (2013) yang mengukur pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yaitu, analisis Minat dan Kebutuhan tersebut harus berdasarkan minat dan kebutuhan yang di butuhkan dan rasakan (felt-need).(Agropolitan 2004)

Pembangunan yang dilakukan selama ini masih menunjukan ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan. Hal ini dapat terjadi karena kebijakan pembangunan yang kurang mendukung pembangunan kawasan perdesaan sehingga mengakibatkan permasalahan pendapatan antar daerah. Selain itu, gagalnya pembangunan di daerah perdesaan telah menimbulkan blackwash, yang dimiliki kawasan perkotaan sehingga membuat kawasan perdesaan semakin miskin, memburuk dan meningkatkan pengangguran. Sehingga dari permasalahan yang diperoleh dan untuk menyelesaikan masalah tersebut pihak dari aparat daerah Kabupaten

Berau menciptakan inovasi program pejuang sigap sejahtera (PSS) yang dimana program ini untuk menjawab permasalahan dalam pembangunan kawasan perdesaan. Dan penulis ingin mengetahui bagaimana kinerja program PSS tersebut dan seberapa efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan kawasan perdesaan yang ada di Kabupaten Berau.

KAJIAN PUSTAKA

Inovasi pemerintah salah satu senjata utama dalam mewujudkan daya saing dalam suatu negara tentu juga menjadi suatu hal penting dalam meningkatkan perekonomian di sebuah daerah karena pada dasarnya Indonesia menganut sistem desentralisasi yang membuat setiap kepala daerah harus mempunyai ide atau inovasi yang matang dalam meningkatkan perekonomian di daerahnya. Menurut Peter Drucker (1986) Dalam (Hutauruk 2010) Berpendapat bahwa setiap organisasi perlu suatu kompetensi inti (*core competence*), yaitu inovasi. Inovasi mendorong pertumbuhan organisasional meningkatkan keberhasilan yang akan datang, dan merupakan mesin yang memungkinkan organisasi bertahan dari kerentanan (*viability*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebuah inovasi yang matang menjadi salah satu kekuatan atau kemampuan dalam mencapai kesejahteraan. Selain itu inovasi juga merupakan syarat utama atau sebuah keharusan yang dilakukan dalam mengimplementasikan desentralisasi yaitu mengupayakan kesejahteraan, kemakmuran, serta meningkatkan kemandirian bagi masyarakat dan daerahnya. Di Indonesia, penyelenggaraan pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis dan menarik untuk di kaji karena perbaikan pelayanan publik di negara ini cenderung statis, sedangkan implementasinya sebagaimana di ketahui sangat luas karena mencakup seluruh ruang-ruang publik dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain-lain (Yanuar 2019).

Selaras dengan inovasi maka secara tidak langsung akan mencakup pembangunan perdesaan maupun pembangunan sumber daya manusia yang terdapat di sebuah daerah. Pada dasarnya pembangunan kawasan perdesaan merupakan hubungan antara masyarakat dan juga pemerintah yang didalamnya berusaha dalam membangun rumah tangga untuk mencapai kesejahteraan didalam rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, sudah

sewajarnya bila pembangunan kawasan perdesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia. Jika tidak, maka jurang pemisah antara kota dan desa semakin tinggi terutama dalam konteks perekonomian, Bappenas, 2012 dalam (Diartho et al. 2018). Menurut Shukla dalam (Diartho et al. 2018) melalui perencanaan wilayah (*regional planning*) bisa memperoleh dua point yaitu pembangunan dan berkelanjutan dengan jawaban yang diuraikan (a). Perencanaan wilayah perdesaan akan membantu pemanfaatan sumber daya lokal yang ada, sumber daya fisik dan teknologi (b). perencanaan wilayah perdesaan akan membantu pembuatan perencanaan dimana akan mengisi kebutuhan lokal dan (c). perencanaan wilayah perdesaan akan membantu mengurangi pembangunan yang kurang berimbang antara wilayah perdesaan. Tetapi masih ada beberapa hal yang menghambat untuk memperoleh hasil yang maksimal seperti permasalahan pada sumber daya manusia yang di dasari dengan arus migrasi dimana kaum elit mengeksploitasi sumber daya yang terdapat di sebuah desa hal ini dapat terjadi karena pengaruh sumber daya manusia yang tidak memadai. Dan untuk mengatasi masalah tersebut Rustiadi (2003) Dalam (Diartho et al. 2018) pengembangan wilayah perdesaan harus mengandung prinsip-prinsip: (1) mengedepankan peran serta masyarakat dan memprioritaskan untuk menjawab kebutuhan masyarakat pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator pembangunan dari pada sebagai pelaksana. (2) menekankan aspek proses dibandingkan pendekatan-pendekatan yang menghasilkan produk-produk perencanaan berupa master plan dan sejenisnya.

Pembangunan kawasan perdesaan dan inovasi merupakan hal yang berkaitan dan tidak bisa melepaskan karna pada dasarnya kedua hal tersebut untuk mencapai keberhasilan rumah tangga dalam sebuah daerah. Hal tersebut yang melandasi Pemerintah Kabupaten Berau menciptakan inovasi yang untuk menunjang perekonomian masyarakat kabupaten berau melalui

Pejuang Sigap Sejahtera (PSS). PSS salah satu program unggulan yang dirilis pada tahun 2018 dan baru dapat dilaksanakan pada tahun 2019 dan pada tahun 2021 PSS telah memasuki tahun ketiganya. Pejuang Sigap Sejahtera dijalankan berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 56 tahun 2018. PSS diharapkan mampu mendorong untuk mewujudkan Kabupaten Berau yang sejahtera dan berdaya saing berbasis sumber daya manusia dan sumber daya alam berkelanjutan melalui program yang ada di dalam Pejuang Sigap Sejahtera.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskripsi karna di anggap cocok untuk mengungkap secara mendalam terkait pertanyaan penelitian. Studi literature digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menggali data sekunder berupa dokumen publik seperti: dokumen kebijakan, laporan instansi/pemerintah, laporan penelitian serta sejumlah dokumen lainnya yang ada kaitannya dengan masalah penelitian (Zaluchu 2020).

Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data (Agusta 2014) melalui tiga analisis. Langkah pertama pengumpulan data mengenai inovasi pemerintah melalui program PSS, kemudian penyajian data berupa naratif, penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis, dan tahap terakhir pengambilan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pejuang Sigap Sejahtera (PSS)

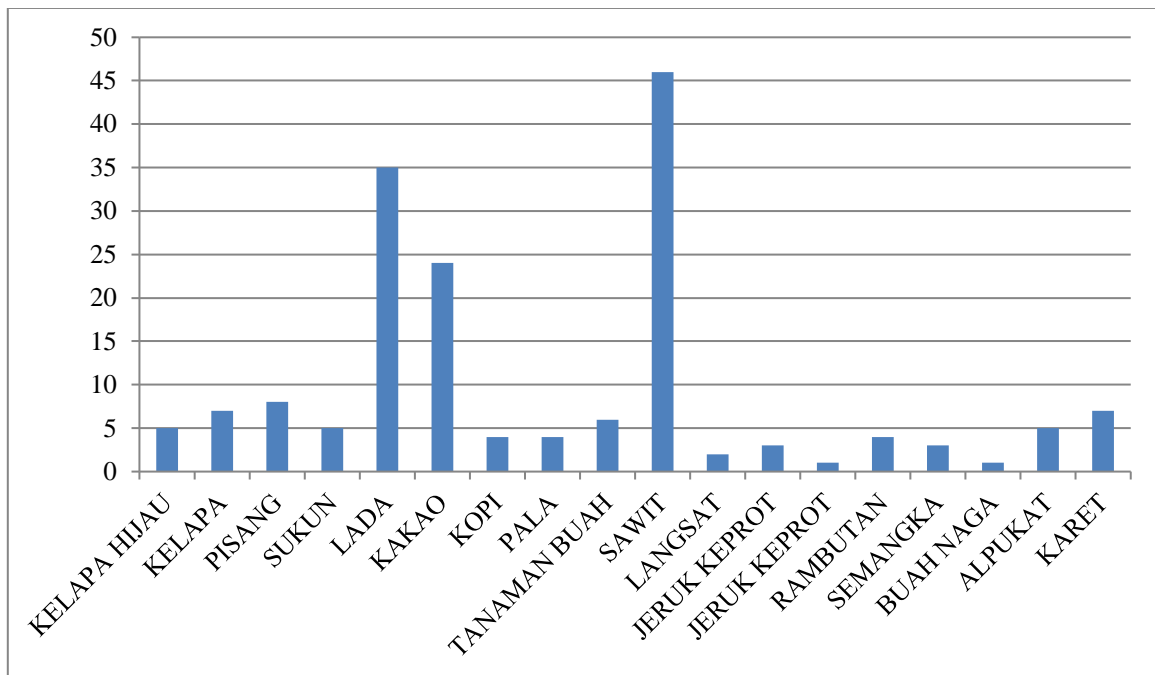
Program Pejuang Sigap Sejahtera salah satu inovasi yang diluncurkan oleh pemerintah kabupaten berau melalui Peraturan Bupati Berau Nomor 56 Tahun 2018 yang dimana program ini berfokus pada 3 point yaitu (a) Tata kelola kampung (b) Tata kelola SDA yang lestari dan berkelanjutan dan (c) Kesejahteraan kampung yang dimana 3 point tersebut diwujudkan melalui kegiatan masing-masing seperti tata kelola kampung memiliki kegiatan pendampingan tata kelola kampung dengan, tata kelola SDA dengan kegiatan pendampingan tata kelola SDA dan kesejahteraan kampung dengan kegiatan pendampingan ekonomi kampung melalui BUMK dan PRUKADES. Pejuang

Sigap Sejahtera (PSS) berkerja sama dengan Yayasan Dharma Bhakti Berau Cool (YDBBC), Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dan juga Universitas Gajah Mada (UGM). Keempat lembaga tersebut tergabung dalam suatu konsorsium yang didalamnya merupakan wadah pengambilan kebijakan teknis program Pejuang Sigap Sejahtera.

Program PSS merupakan salah satu bentuk upaya dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dan memberikan kesempatan masyarakat lokal untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi yang profuktif, sehingga dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dengan demikian, pejuang sigap sejahtera hakekatnya diarahkan untuk meningkatkan akses hidup sejahtera bagi masyarakat lokal dengan dilakukannya pendampingan terhadap masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya yang ada.

B. Peningkatan Pendapatan Ekonomi Melalui Pertanian dan Perkebunan

Kabupaten Berau merupakan salah satu kabupaten yang mengembangkan konsep kawasan perdesaan yang berbasis pada potensi desa sebagai salah satu pendekatan melalui pembimbingan untuk memacu pembangunan dan pengembangan wilayah perdesaan dengan melihat potensi sumber daya alam yang ada dan untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan wilayah perdesaan melalui PSS masyarakat lokal memperoleh bimbingan disektor pertanian dan perkebunan.



(Sumber: Laporan Tahunan Program PSS Tahun 2019)

Kalimantan Timur salah satu provinsi yang memiliki cukup banyak kebun kelapa sawit, namun dari perkebunan kelapa sawit tersebut juga memiliki efek negatif seperti geresang pada sekitar perkebunan kelapa sawit dan juga efek limbah dari pabrik tersebut hal ini didasari berulang kali sungai yang berada di sekitar Kalimantan Timur mengalami pencemaran karna efek limbah tersebut. Hal ini yang membuat pemerintah kabupaten berau untuk membuat inisiatif untuk mengantisipasi terjadinya efek negatif limbah maupun hutan hijau yang berkuang karna bertambahnya kebun kelapa sawit dengan melakukan pelatihan kepada masyarakat lokal untuk membuka potensi lain di bidang pertanian dan perkebunan melalui perkebunan kakao, lada dan lain-lain. Dan PSS juga tidak hanya melakukan pendampingan perkebunan saja akan tetapi juga menginisiasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, perusahaan coklat berau cool, dan juga masyarakat petani kakao. Dengan menggunakan skema pendampingan, pembiayaan, dan juga pemasaran hasil biji kakao.

C. Peningkatan Kualitas Perdesaan Melalui Pengembangan Potensi Desa

Kabupaten berau memiliki luas wilayah 34.127,35 km² yang terdiri dari daratan 23.558,50 Km² dan lautan 10.568,85 Km² sepanjang 4 mil dari garis pantai pulau terluar. Dan sebagian besar kawasan kabupaten berau dikelilingi hutan hijau dan menyimpan sumber daya alam yang dapat bernilai ekonomis. Kabupaten berau memiliki sangat banyak potensi dalam berupa tempat wisata hal ini dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan perekonomian melalui tata kelola desa, yang memiliki potensi alam untuk dijadikan wisata seperti, pulau derawan, maratua, sangalaki, kakaban empat potensi tersebut dimanfaatkan melalui pengelolaan masyarakat dan juga pengeola tempat wisata tersebut untuk menarik peminat wisata. Dan beberapa desa yang memiliki sumber potensi wisata lain seperti, kecamatan segah yang memiliki air terjun tambalang, labuhan cermin di kecamatan biduk-biduk, dan pemandian air panas berasa asin di kampung biatan. Dengan potensi ini membuat pemerintah kabupaten berau berusaha agar potensi yang dimiliki terekspos untuk para turis internasional maupun turis lokal. Dengan pengelolaan tempat wisata yang baik, dan perbaikan jalan menuju akses tempat wisata yang mulai di benah tak luput juga dengan menggunakan iklan yg di ekspos di sosial media pejuang sigap sejahtera.

D. Unsur Produktivitas Program PSS

Dari unsur efektivitas program PSS yang dilunching pada tahun 2018 dan penyempurnaan pada tahun 2019 merupakan program yang cukup efektif ini dapat dilihat dari kebijakan program tesebut dan bentuk nyata dari kenerja tesebut dimana disebagaian desa di kabupaten berau sudah mengalami kemajuan karna adanya program ini yang berbasis untuk melayani keluhan masyarakat desa. Program ini juga tidak gaptek terhadap perkembangan jaman karna bentuk program ini dapat temukan beberntuk amplikasi dan

tidak hanya itu program ini juga semua kegiataannya di tampilkan disosial media seperti instrgram official dari PSS dan Website Resmi milik Program PSS sehingga program ini dapat dilihat secara langsung keefektifannya.

PENUTUP

Program Pejuang Sigap Sejahtera (PSS) merupakan salah satu inovasi yang diciptakan oleh pemerintah daerah kabupaten berau yang disahkan oleh bupati Kabupaten berau, inovasi yang baru saja launching 2018 dan disempurnakan pada tahun 2019 merupakan salah satu inovasi yang cukup efektif dan efisien dimana inovasi baru yang sudah menciptakan hasil yang cukup signifikan. Program ini juga tidak berdiri sendiri juga menjalin kerja sama dari berbagai instansi sehingga lebih mendorong tercapainya *collaborative governance*.

Program ini juga dilandasi dengan kerperdulian aparaturnya daerah kepada masyarakat untuk mensejahterakan kehidupan mereka dan mengutamakan atau memprioritaskan pembangunan kawasan perdesaan. Namun pada dasarnya program ini merupakan program yang bisa dibilang masih muda, maka diperhatikan lebih ekstra untuk mengantisipasi permasalahan yang akan muncul dan keberhasilan dari penerapan program ini bisa dikembangkan lebih baik lagi. Yang dimana berdasarkan laporan tahunan Program PSS masih banyak harus di evaluasi dari kebijakan program ini seperti perlu adanya tindak lanjut terhadap proses fasilitasi pemerintahan kampung secara berkesinambungan. Dan juga peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam berkomunikasi antar stakeholder terkait dengan pengembangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agropolitan, Pengembangan. 2004. "Pembangunan Perdesaan Berkelanjutan Melalui Model Pengembangan Agropolitan." (1997).
- Agusta, Ivanovich. 2014. "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 02(1998): 1-11.
- Andari, Rosita Novi, and Susy Ella. 2019. "Developing A Smart Rural Model for Rural Area Development in Indonesia." *Jurnal Borneo Administrator* 15(1): 41-58.

- Diartho, Herman Cahyo et al. 2018. "Pengembangan Wilayah Perdesaan Berbasis Pada Potensi Sumber Daya Alam Di Kabupaten Bondowoso Development of Rural Areas Based on Potential Natural Resources in Bondowoso Regency." *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 18(2): 102–22.
- Hutauruk, Thomas R. 2010. "Tinjauan Daya Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur." *Jurnal Borneo Administrator* 6(3).
- Trapsilowati, Wiwik, Sugeng Juwono Mardihusodo, Yayi Suryo Prabandari, and Totok Mardikanto. 2015. "Pengembangan Metode Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengendalian Vektor Demam Berdarah Dengue Di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah." *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 18(1): 95–103.
- Wicaksono, Kristian Widya. 2019. "TIPOLOGI INOVASI SEKTOR PUBLIK PADA TIGA PROGRAM INOVATIF PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA (Tinjauan Reflektif Terhadap Tiga Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018)." *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik* 1(2): 196.
- Yanuar, Reza Mochammad. 2019. "Inovasi Pelayanan Publik (Studi Kasus: Public Safety Center (PSC) 119 Kabupaten Bantul Sebagai Layanan Kesehatan Dan Kegawatdaruratan)." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 04(0274): 20. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi>.
- Zaluchu, Sonny Eli. 2020. "Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama." *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 4(1): 28.

Perundang-Undangan

Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Sumber Lain

Beraukab.go.id

Dpmpd.kaltimprov.go.id